



PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGAWASAN FUNGSIONAL, DAN PELAPORAN KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK DI KABUPATEN BATANG

Agung Puja Laksana ✉ **Bestari Dwi Handayani**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Desember 2013

Disetujui Januari 2014

Dipublikasikan Mei 2014

Keywords:

*Clarity Budget Targets,
Functional Supervision,
Reporting Performance,
Public Accountability*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas publik di kabupaten Batang. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian anggaran dan keuangan di kantor dinas yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Batang. Teknik sampling yang digunakan adalah convenience sampling. Sampelnya adalah pegawai bagian anggaran dan keuangan sejumlah 52 responden. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Berdasar dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional dan pelaporan kinerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Saran dalam penelitian ini adalah seluruh dinas yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Batang harus meningkatkan kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja agar akuntabilitas publik dapat ditingkatkan..

Abstract

This research aimed at analyzing influence clarity budget targets, functional supervision, and reporting performance against public accountability in district Batang. Population in this research is part of the budget and finance officer in the officer of Department that is in local government district of Batang. The sampling technique used is convenience sampling. Samples used in research as much as 52 respondents. Analysis tools to test hypotheses is multiple regression analysis. The results of this research show that clarity of the budget objectives, functional oversight and reporting performance partially no effect against public accountability. Suggestions in this study is the whole Department that is in the local government district of the rod should improve the clarity of the budget objectives, functional supervision, and reporting on performance to public accountability can be improved.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: puja.puput22@gmail.com

ISSN 2252-6765

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Disamping itu, setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan melalui kegiatan, program atau kebijaksanaan dalam pemerintahan dibutuhkan pembagian wewenang atau pendelegasian yang tepat.

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Halim, 2004). Dalam menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan. Menurut Mahsun dkk (2006), akuntabilitas publik berarti pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak sebagai pelaku pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar informasinya. Selain itu, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Wulandari, 2009). Berhasil atau tidaknya suatu

pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik. Secara umum, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan. Sehingga dalam hal ini akuntabilitas publik sangat penting untuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Kenis, 1979 dalam Syafril, 2009). Dalam keberhasilan kejelasan sasaran anggaran maka diharapkan akan tercapainya tugas suatu organisasi sehingga akan mewujudkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan pengawasan fungsional yang efektif. Pada pemerintah daerah terdapat aparat pengawasan fungsional intern pemerintah kabupaten atau kota yang membantu pimpinan pemerintah dalam melakukan pengawasan apakah kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang ditentukan. Tujuan dari akuntabilitas itu sendiri adalah untuk memberikan dan menyajikan beberapa

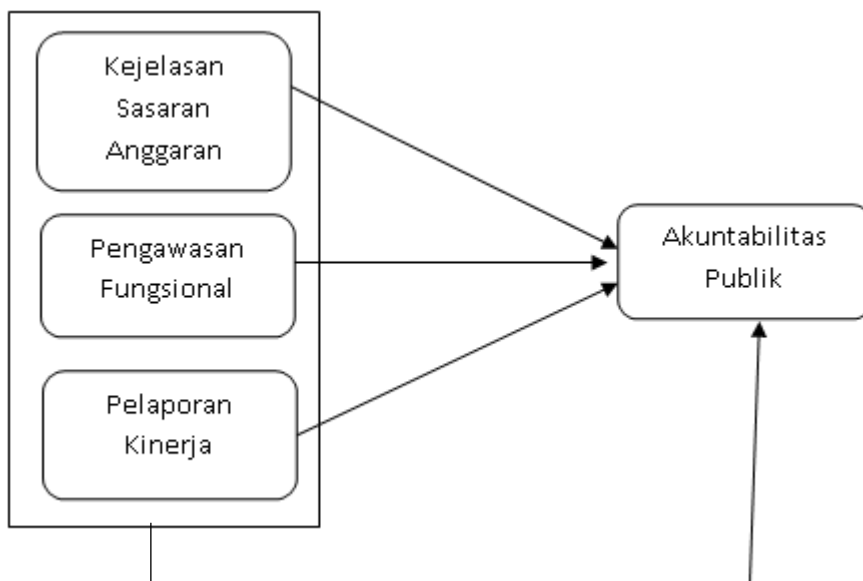
informasi yang diperlukan dan dimengerti oleh pihak yang berkepentingan terutama masyarakat. Pelaporan kinerja disini meliputi bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pegawai sektor publik berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan akuntabilitas sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam keberhasilan akuntabilitas pada sektor publik dibutuhkan suatu kejelasan sasaran dan tujuan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggung-jawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan pengawasan terhadap organisasi sektor publik tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya pengawasan yang baik maka akan dihasilkan suatu pelaporan yang baik pula. Hal ini meningkatkan motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat publik.

Penelitian yang dilakukan Herawaty (2011) telah melakukan penelitian tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap

akuntabilitas kinerja yang diuji secara parsial. Putra (2008) menguji tentang pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Wulandari (2009) menguji tentang pengaruh pengawasan fungsional dalam menunjang akuntabilitas publik pada pemerintahan kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik yang artinya bahwa semakin baik pengawasan fungsional maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas publik. Satria (2010) menguji pengaruh peran inspektorat daerah dan pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap terwujudnya akuntabilitas publik pada SKPD yang ada di kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif peran inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan SPI. Sedangkan Rahayu (2011) menemukan bahwa audit kinerja dan pengawasan fungsional secara parsial dan bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik pada pemerintahan kota Bandung.

Dari berbagai fenomena dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena cukup penting mengetahui pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional dan pelaporan terhadap akuntabilitas publik.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Hipotesis Penelitian

Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas publik

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Locke (1968) dalam Kenis (1979) yang dikutip dalam Kusumaningrum (2010) mengatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal tersebut menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas publik yang implikasinya terhadap kinerja aparat pemerintah serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atas apa yang telah dikerjakan yang berhubungan dengan kejelasan sasaran anggaran. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Publik.

Pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik

Pengawasan Fungsional merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah (Wasistiono, 2010). Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deddy dan Sherly (2010) dalam Wulandari (2009) menyatakan bahwa pengawasan fungsional akan menunjang akuntabilitas publik. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Sehingga dengan dilaksanakannya pengawasan fungsional yang memadai akan menunjang akuntabilitas publik. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pengawasan Fungsional berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Publik.

Pengaruh pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas publik

Pelaporan kerja merupakan alat akuntabilitas, hambatan substansi lainnya dalam mengefektifkan manajemen sektor publik dan pelaksanaan pelaporan adalah kesulitan pengukuran, mengkomunikasikan apa yang telah selesai dilakukan, dan seberapa baik dari pekerjaan itu. Secara tidak langsung, akuntabilitas sektor publik adalah baik, penerima layanan dapat mengindikasikan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan melalui pemilihan umum secara langsung. Pelaporan kinerja yang diterbitkan secara regular akan menjadi langkah kemajuan dalam mendemonstrasikan proses akuntabilitas. Pelaporan kinerja juga dapat disediakan untuk memotivasi kinerja seseorang misalnya, pegawai sektor publik, seperti banyak orang, dapat termotivasi oleh adanya kompetisi. Akan tetapi jauh lebih sulit untuk mengkomunikasikannya dengan kepentingan pegawai unit kerja organisasi, tingkat penyelesaian, dan kinerja perbandingan pengukuran kinerja dapat membantu menampilkan seberapa baik kinerja pegawai dibandingkan dengan pegawai lainnya. Kesimpulannya bahwa pelaporan kinerja berfungsi sebagai alat akuntabilitas, sebagai tolak ukur suatu keberhasilan organisasi sektor publik, dan juga memotivasi pegawai sektor publik tersebut. Pelaporan kinerja dijadikan acuan untuk memacu dan memotivasi tingkat kinerja pegawai. Jika hasil pelaporan tersebut positif maka akan meningkatkan motivasi pegawai, apabila hasilnya negatif maka akan sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pelaporan kinerja berpengaruh positif terhadap akunabilitas publik.

Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas publik

Kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja saling berkaitan sebagai indikator untuk mengetahui pengaruh terhadap akuntabilitas publik. Variabel-variabel bebas tersebut berpeluang dapat mempengaruhi akuntabilitas publik. Asumsi ini berdasarkan hasil penelitian

dari Herawaty (2011) bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi, sedangkan Putra (2008) menguji tentang pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wulandari (2009) menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja berpengaruh positif terhadap akunabilitas publik.

METODE

Pada penelitian ini populasi yang akan digunakan adalah pegawai bidang anggaran dan keuangan yang berjumlah 9 orang di seluruh kantor dinas pemerintah daerah Kabupaten Batang yang berjumlah 13 dinas. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel ini adalah *convenience sampling*. Sampel dihitung menggunakan rumus *slovin* seperti berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : ukuran sampel

N: ukuran populasi

e :persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditoleransi

Dengan demikian ukuran sampel minimal dapat ditentukan sebagai berikut:

$$N = 9 \times 13 = 117$$

$$n = \frac{117}{1 + 117(0,1)^2}$$

$$n = \frac{117}{2,17} = 53,91$$

Dengan perhitungan menggunakan rumus slovin, didapat ukuran minimal sampel

penelitian sebesar 53,91 responden, dan analisis yang digunakan adalah regresi dibulatkan menjadi 52 responden. Metode berganda.

VARIABEL PENELITIAN

Berikut ini merupakan variabel penelitian dan cara pengukurannya :

Variabel	Definisi	Pengukuran
Kejelasan Sasaran Anggaran	Kejelasan sasaran anggaran merupakan suatu misi atau tugas dari pengelola keuangan daerah untuk mendistribusikan atau menyalurkan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara merata dan tepat sasaran	Tujuan Kinerja Standar Jangka waktu Sasaran prioritas Tingkat kesulitan Koordinasi
Pengawasan Fungsional	Suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi	persiapan pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan pelaporan pemeriksaan tindak lanjut pemeriksaan.
Pelaporan Kinerja	merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan.	motivasi meningkatkan kinerja mengkomunikasikan antar tingkat manajemen penyampaian informasi secara tepat kepada masyarakat.
Akuntabilitas public	kewajiban pihak pemegang saham (<i>agent</i>) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>principal</i>) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut	Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum Akuntabilitas proses Akuntabilitas program Akuntabilitas kebijakan.

Semua pengukuran indikator dilakukan dengan menggunakan point skala likert, yaitu nilai 4 (SL=Selalu), 3 (SR=Sering), 2 (KK=Kadang-kadang), 1 (TP=Tidak Pernah), 0 (STP=Sangat Tidak Pernah) dan 4 (SS=Sangat setuju), 3 (S=Setuju), 2 (RR=Ragu-ragu), 1 (TS=Tidak setuju), 0 (STS=Sangat tidak setuju).

Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data

Metode penelitian menggunakan data primer sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei langsung dengan memberikan kuisioner pada responden pegawai bidang anggaran dan keuangan seluruh dinas

pemerintah daerah Kabupaten Batang. Pada penelitian ini kuisioner yang berisikan sejumlah pernyataan yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas publik. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviation
kejelasan sasaran anggaran	50	18.00	28.00	22.9000	2.73488
pengawasan fungsional	50	29.00	48.00	42.0600	4.72255
pelaporan kinerja	50	14.00	24.00	19.4800	2.22454
akuntabilitas publik	50	26.00	36.00	31.1400	3.20720
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Data Primer yang diolah

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dengan jumlah sampel 50, dapat diperoleh hasil untuk kejelasan sasaran anggaran (X1), jawaban nilai minimum responden sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 28, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) 22,9. Variabel pengawasan fungsional (X2), jawaban nilai minimum responden sebesar 29 dan nilai maksimum sebesar 48, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) 42,06. Variabel pelaporan kinerja (X3), jawaban nilai minimum responden sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 24, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) sebesar 19,48. Variabel akuntabilitas publik (Y), jawaban nilai minimum responden sebesar 26 dan nilai maksimum sebesar 36, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) sebesar 31,14.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu dilakukan uji prasyarat analisis. Pada uji normalitas nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S)

sebesar 0,896 dan tidak signifikan pada 0,05 maka dapat dikatakan bahwa uji normalitas terpenuhi. Uji Multikolinieritas menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Nilai kejelasan sasaran anggaran (1,007), pengawasan fungsional (1,061), dan pelaporan kinerja (1,069). Hasil ini membuktikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, hasil tersebut berdasarkan hasil scatterplot bahwa tidak ada pola yang jelas sehingga dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada analisis regresi berganda diperoleh persamaan $Y = 3.594 + 0,079X1 + 0,210X2 - 0,347X3$. Pada pengujian hipotesis dilakukan pencarian nilai koefisien determinasi, uji parsial, dan uji simultan. Berikut adalah hasil uji parsial (uji statistik t) dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Uji Parsial

Model	Unstandarized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Ket
	B	Std.	Beta			

	Eror					
(Constant)	3.594	.700		5.135	.000	
Kejelasan X1	.079	.124	.086	.634	.529	ditolak
Pengawasan X2	.210	.126	.232	1.661	.104	ditolak
PelaporanX3	-.347	.135	-.361	-2.578	.013	ditolak

Sumber: Data primer yang diolah, 2014.

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) memberikan nilai koefisien sebesar (0,079) dengan nilai signifikansi sebesar (0,529), sehingga dinyatakan tidak berpengaruh signifikan positif. Berlawanan dan tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan yaitu berpengaruh positif. Oleh karena itu hipotesis pertama yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik **ditolak**. Hal tersebut mencerminkan bahwa responden yang mayoritas pegawai dinas/ SKPD pemerintah daerah Kabupaten Batang ragu-ragu tentang sasaran yang hendak dicapai, bahkan mereka tidak setuju jika kerja sama tim diperlukan untuk mencapai sasaran di instansi tersebut terutama terhadap penggunaan anggaran. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif jawaban responden yang mana mayoritas responden tidak setuju terhadap kejelasan sasaran anggaran yang hendak dituju.

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel pengawasan fungsional memiliki nilai koefisien (0,210) dengan nilai signifikansi sebesar (0,104), sehingga dinyatakan tidak berpengaruh signifikan. Berlawanan dan tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan yaitu berpengaruh positif. Oleh karena itu hipotesis kedua yaitu pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik **ditolak** dan tidak sesuai dengan hasil penelitian Wulandari (2009) bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Pernyataan ini diperkuat karena kuesioner pengawasan fungsional diberikan dan diisi oleh pegawai yang berada di dinas-dinas/ SKPD Kabupaten Batang, bukan kepada Inspektorat Daerah selaku aparat pengawasan

fungsional sehingga jawaban kuesioner tersebut tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dalam pengisian kuesioner seharusnya dilakukan oleh Inspektorat daerah yang berperan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap instansi pemerintah. Dengan adanya pengawasan fungsional tersebut dapat diketahui apakah instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel pelaporan kinerja memiliki nilai koefisien (-0,347) dengan nilai signifikansi (0,013), sehingga dari hasil nilai koefisien dapat dilihat bahwa hasil yang didapat adalah negatif dan tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan. Oleh karena itu hipotesis ketiga yaitu pelaporan kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik **ditolak**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pegawai dilingkup SKPD kabupaten Batang ragu-ragu terhadap pelaporan kinerja yang dihasilkan sehingga pengaruhnya negatif untuk akuntabilitas itu sendiri. Kinerja yang dihasilkan oleh pegawai bagian anggaran dan keuangan SKPD kabupaten Batang tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal itu mempengaruhi motivasi seorang pegawai dalam bekerja. Sesuai dengan teori motivasi bahwa kinerja negatif akan menurunkan motivasi seseorang dalam bekerja. Dalam konteks ini, pelaporan kinerja berperan sebagai tolak ukur suatu keberhasilan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja manajemen. Hasil untuk uji simultan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.971	3	.324	2.834	.048 ^b
Residual	5.252	46	.114		
Total	6.222	49			

Sumber: Data primer yang diolah, 2014.

Berdasarkan tabel uji simultan di atas dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 2,834 dengan probabilitas sebesar 0,048. Hasil nilai probabilitas lebih kecil dari 0,005 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen yaitu akuntabilitas publik. Berarti dengan kata lain variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas publik sehingga hipotesis keempat **diterima**.

SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Secara simultan ketiga variabel ini berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Seluruh dinas yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Batang harus meningkatkan kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja agar akuntabilitas publik dapat ditingkatkan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat juga menambah jumlah sampel penelitian, bukan hanya di kantor dinas saja, melainkan di seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Batang.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.

Herawaty, Netty. 2011. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi". Jurnal ISSN, Volume 13, Nomor 2, Hal. 31-36 Jambi: Universitas Jambi.

Kusumaningrum, Indraswari. 2010. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah". Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi UNDIP

Mahsun, Mohamad, Firma. S, dan Heribertus.2006.Akuntansi Sektor Publik. Ed 1. Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA

Mardiasmo.2002. Serial Otonomi Daerah: Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah.ANDI : Yogyakarta.

Putra, Deki. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Padang. Artikel. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Rahayu, Cici. 2011. Pengaruh Audit kinerja Sektor Publik dan Pengawasan fungsional terhadap Akuntabilitas Publik. Skripsi. UNIKOM. Bandung.

Satria,budi.2010. Pengaruh Peran Inspektorat Daerah dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Terwujudnya Akuntabilitas Publik. Skripsi. UNP. Padang.

Syafrial. 2009. Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tesis. Universitas Sumatera Utara

Ulum, Ihyaul. 2009. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta : Bumi Aksara.

Wasistiono, Sadu. 2010. Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah. Bandung : Fokusmedia.

Wulandari, Indah. 2013. Pengaruh Pengawasan Fungsional dalam menunjang Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kota Padang. Artikel.

Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.